



Luberan Pedagang Picu Kerumunan

■ Pemkot Yogya Atur Lalu Lintas Transaksi
di Pasar Tradisional



MENERTIBKAN - Petugas Satpol PP Kota Yogyakarta berupaya menertibkan aktivitas luberan pedagang di depan Pasar Kranggan, Selasa (6/7).

TRIBUN JOGJA/AZKA RAMADHAN

Yogyakarta,
Kepala

YOGYA. TRIBUN - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta berupaya mengatasi luberan pedagang di luar pasar tradisional di tengah PPKM Darurat. Hal ini lantaran luberan pedagang ini menjadi masalah pelik dan berpotensi menimbulkan kerumunan.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Yudianto Dwi Sutono, mengatakan, sejauh ini pedagang pasar sudah patuh terhadap aturan pembatasan kapasitas maksimal 50 persen. Namun, potensi kerumunan justru muncul dari luberan pedagang yang berjulan di area depan pasar.

"Masyarakat dan konsumen biasanya ingin yang cepat dan praktis yang penting dapat barang, sehingga lebih sering belanja di luar pasar," ucapnya. Selasa (6/7).

Untuk mengantisipasi kerumunan di luar pasar, pihaknya sudah berkoordinasi dengan kecamatan dan Satpol PP agar ditempuh upaya penertiban. Menurutnya, jika dibiarkan begitu saja, maka akan jadi perseden buruk di tengah semangat pemerintah dalam memutus rantal Covid-19.

"Kewenangan pedagang di luar area pasar itu kan ada di kecamatan dan Satpol PP. Makanya, kami berkoordinasi dengan kedua instansi itu, untuk memastikan protokol kesehatan berjalan dengan baik," ujar Yudianto.

Sementara untuk kawasan di dalam pasar, ia memastikan, tidak ada kendala berarti dalam pelaksanaan PPKM Darurat. Bahkan, agar kapasitas pengunjung bisa terpantau dan tidak melebihi 50 persen, pihaknya hanya mengoperasikan pintu utama sebagai akses keluar masuk konsumen.

"Misalnya, di Pasar Beringharjo kami menutup pintu-



Masyarakat dan konsumen biasanya ingin yang cepat dan praktis yang penting dapat barang, sehingga lebih sering belanja di luar pasar.

Yudianto Dwi Sutono

pintu masuk yang ada di samping pasar. Jadi, pintu yang dibuka itu hanya pintu-pintu yang utama saja," cetusnya.

Pedagang-pedagang yang menjual selain kebutuhan pokok pun sudah diminta untuk tidak membuka lapaknya selama PPKM Darurat berlangsung. Yudianto juga menyarankan, supaya selama masa pembatasan, masyarakat dapat memanfaatkan layanan belanja secara daring.

"Konsumen bisa memanfaatkan sistem belanja *online*, sudah bekerjasama dengan aplikasi Gojek juga. Bahkan, ada *cashback*, promo, yang bisa didapat," ujarnya.

Pembatasan jam operasional

Sementara itu, khusus Pasar Giwangan yang pada masa normal beroperasi selama 24 jam penuh, saat ini dibatasi sampai pukul 20.00 saja. Oleh sebab itu, guna memastikan pasokan kebutuhan pokok terjaga selama PPKM Darurat, seluruh distributor diminta datang lebih awal.

"Distributor yang biasanya masuk ke Pasar Induk Giwangan malam hari, kami minta mengatur kembali jam pengiriman, agar tidak lebih

dari puku 20.00," katanya.

Pemkot juga melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pada hari keempat pemberlakuan PPKM Darurat, Selasa (6/7) pagl. Kali ini, pasar tradisional Kranggan, Jetis, yang jadi sasaran.

Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti, yang memimpin sidak tersebut mengatakan, pihaknya ingin memastikan penerapan prokes di tengah aktivitas ekonomi masyarakat. Sebab, pasar tradisional merupakan salah satu titik paling rawan.

"Agar perekonomian selama pandemi ini bisa tetap berjalan, kuncinya adalah masyarakat harus disiplin ya, menerapkan prokes sesuai imbauan dari pemerintah," cetusnya.

Dalam kesempatan itu, Haryadi pun meminta kepada Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, supaya dapat meningkatkan pengawasan di seluruh pasar tradisional. Sehingga, semua potensi pelanggaran prokes sanggup diantisipasi.

"Bukan cuma pedagang, masyarakat yang berkunjung ke pasar juga harus disiplin prokes. Kalau itu disiplin, ekonomi perlahan juga bisa pulih kembali," ucap Wali Kota.

Orang nomor satu di Kota Yogyakarta tersebut memastikan, pihaknya akan terus melakukan penegakkan di sejumlah titik terkait penerapan PPKM darurat. Harapannya, penyebaran Covid-19 di kota pelajar pun bisa terus ditekan.

"Sejauh ini, sebagian besar memang sudah tertib. Tentu, kita mengapresiasi para pelaku usaha, serta warga masyarakat, yang penuh kesadaran mematuhi aturan pemberlakuan PPKM darurat ini," pungkas Haryadi. (aka)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Perdagangan			

Yogyakarta, 28 November 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005